
ALASAN MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA (MCAI) DALAM MENDORONG PENYEDIAAN ENERGI TERBARUKAN : STUDI KASUS DESA TELUK SUMBANG, KABUPATEN BERAU

Muhammad Fachruzzainie¹

Abstract: *This study aims to explain the reasons for the Millennium Challenge Account- Indonesia is involved in contributing to development in Indonesia, especially the case study of Teluk Sumbang village from 2011 to 2022. The type of research used is explanatory. The data used are primary and secondary types of data obtained through the results of depth interviews and digital library reviews from books, journals, reports, documents, and internet sources that contain relevant data and information related to research conducted by the author. The concept used is the Green Economy Concept, with a focus on Renewable Energy.*

The results showed that the reason why the Indonesian government involved the role of MCAI in providing renewable energy based on solar power plants in Teluk Sumbang Village. That Teluk Sumbang village is one of the farthest areas on the east coast of Berau regency that does not have a PLN subsidized electricity network. Due to the slow factor of regional development on the connecting roads between villages, the lack of population growth is due to the low population mobilization in the village every year, and the location of settlements that are far from each other's electricity distribution sources. So the government involves MCAI in overcoming this dependence by encouraging the provision of renewable energy based on village solar power plants through a compact grant program sourced from the Millennium Challenge Corporation.

Keywords: *MCAI, Renewable Energy, Teluk Sumbang Village.*

Pendahuluan

Isu krisis ketergantungan energi listrik merupakan permasalahan umum yang terjadi di Indonesia terutama di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2011-2015 energi listrik di Kalimantan Timur belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi listrik warganya sehari-hari. Kendala yang terjadi diantaranya akses pembangunan jaringan listrik nasional pemukiman yang berjauhan dan rendahnya kualitas pelayanan energi listrik yang sering terjadinya pemadaman bergilir di beberapa kawasan daerah padat penduduk kota hingga desa

Khususnya kawasan kabupaten Berau untuk layanan listrik, sering terjadi pemadaman listrik sepihak oleh PLN yang mana pemadaman listrik berlangsung selama 5 – 9 jam di waktu petang hari, yang mengakibatkan berdampak terhambatnya pada kegiatan perkantoran dan ekonomi warga Berau sehari-hari. Kurangnya kepuasan masyarakat mengakibatkan terjadinya aksi protes turun di jalan oleh kalangan warga Berau (Berita Kaltim, 2020)

Meskipun permasalahan kebutuhan energi listrik di Kalimantan Timur belum sepenuhnya maksimal. Pembangunan listrik daerah terus dikembangkan oleh pemerintah provinsi tiap tahunnya dilihat dari meningkatnya angka pelanggan listrik di Kaltim berdasarkan tinjauan *Electricity Establishment Survey* Indonesia dari tahun 2011 – 2015 (BPS, 2015).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : mfahruzzayn14@gmail.com

Pengembangan listrik di Kaltim tetap terus ditingkatkan mesti mengalami defisit listrik dan pemadaman bergilir. Pemerintah provinsi mengupayakan pemenuhan energi listrik di kawasan desa terpencil dengan memberikan bantuan opsi penyediaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan salah satu upaya mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Harga pokok produksi listrik PLTMH cukup kompetitif bagi wilayah kecil. Memperhitungkan masih banyaknya kendala energi listrik yang timpang perlu ditangani oleh PemProv yang belum terealisasi. Karena manfaat PLTMH memiliki batasan dalam menyuplai energi diterima sebagian besar masyarakat desa salah satunya desa Teluk Sumbang.

Desa Teluk Sumbang merupakan desa literasi yang terletak di hujung pesisir timur kabupaten Berau. Letak desa Teluk Sumbang dengan pemukiman desa lainnya berjauhan sebanyak 35 km dari kecamatan Biduk Biduk, sehingga desa tersebut tidak terkoneksi akses jaringan listrik PLN, yang hanya mengandalkan energi alternatif PLTMH dan diesel yang terbatas. Kawasan desa Teluk Sumbang diuntungkan dengan iklim yang tropis dengan sinar matahari yang stabil dengan suhu panas 24°-31° (BMKGSamarinda.com, 2020) sehingga desa tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan energi terbarukan berbasis PLTS.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan pembangkit energi listrik yang mengandalkan pancaran sinar matahari sebagai sumber energi, menjadikan energi listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. PLTS tersebut telah dibangun di beberapa desa kawasan kabupaten Berau salah satunya desa Teluk Sumbang.

Energi terbarukan berbasis PLTS di desa Teluk Sumbang, merupakan pembangunan energi listrik yang dibangun melalui program hibah *compact* pembangunan berasal dari *Millennium Challenge Corporation* (MCC) yang merupakan lembaga hibah independen berasal dari Amerika Serikat. Yang bergerak pada bantuan hibah dalam mengentas kemiskinan global, memperkuat institusi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan energi (Mcc.gov, 2018). Program tersebut diperuntukan kepada negara – negara berkembang yang memiliki permasalahan nasional yang belum dapat ditangani oleh pemerintah negara.

Indonesia termasuk negara yang menyepakati program MCC dalam mendukung kerjasama pembangunan di Indonesia dengan dibentuk satuan lembaga khusus untuk mengelola perencanaan pembangunan hibah MCC yaitu *Millennium Challenge Account – Indonesia* (MCAI). Hibah yang di terima Indonesia ialah hibah *compact* yang masa implementasinya berlaku selama 5 tahun.

Kerangka Teori

Konsep *Green Economy*

Green economy merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan lingkungan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ekonomi hijau merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan dan ketidakadilan sosial ([Stephen R. Goss, 2012](#)).

Pengertian ekonomi hijau memiliki dua gagasan konsepsi *green economy*.

- Pertama, *green economy* mencoba untuk membangun konsep ekonomi yang sekedar mempertimbangkan masalah ekonomi skala besar seperti investasi pada sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan berupa produk barang dan jasa ramah lingkungan, namun juga fokus pada bagaimana kontribusi investasi terhadap produksi barang dan jasa yang

memberikan manfaat terciptanya lapangan pekerjaan di bidang ramah lingkungan.

- Kedua, *green economy* mencoba sebagai panduan dasar investasi hijau yang mampu mendorong penyelesaian masalah kemiskinan. Yaitu dengan mendorong para pembuat kebijakan agar dapat mampu membuat jajaran dalam pemerintahan dan sektor swasta ikut andil dalam mendukung peningkatan investasi hijau. (Makmun, 2011)

Kedua konsepsi tersebut merupakan dua contoh dari banyak gagasan konsepsi *green economy* yang dikemukakan oleh berbagai pihak. Setiap konsepsi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, namun pada dasarnya semua konsepsi tersebut bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Pilar ekonomi hijau (*pilar of the green economy*) merupakan dasar pembangunan ekonomi ekologis. Ekonomi hijau biasanya memiliki tiga pilar:

1. Efisiensi sumber daya: Pilar ini menekankan pentingnya peningkatan efisiensi sumber daya seperti energi, air dan bahan baku serta meminimalkan limbah dan penggunaan sumber daya yang tidak rasional.
2. Inovasi dan pengembangan teknologi: Pilar ini menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti teknologi energi terbarukan, teknologi pengelolaan limbah dan teknologi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
3. Keterlibatan komunitas / masyarakat: Pilar ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi hijau, serta memberikan pelatihan dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam inisiatif peningkatan keberlanjutan. ([researchgate.net](https://www.researchgate.net), 2020)

Jika ketiga pilar ekonomi hijau ini diperhatikan, maka akan muncul sistem ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam untuk generasi mendatang. Lembaga Internasional *United Nations Environment Programme* (UNEP) merupakan salah satu badan PBB yang berfokus pada masalah lingkungan. Pada tahun 2011, UNEP merilis sebuah laporan yang mengusulkan definisi *green economy* sebagai berikut:

- "Green economy adalah sebuah sistem ekonomi yang memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberikan keuntungan ekonomi yang adil bagi semua orang. Green economy memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekologis, serta membantu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial." ([Unep.org](https://www.unep.org), 2011)

Definisi ini menekankan bahwa *green economy* merupakan sistem ekonomi yang memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberikan keuntungan ekonomi yang adil bagi semua orang. Selain itu, *green economy* dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekologis, serta membantu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penulis adalah eksplanatif, di mana peneliti berupaya menjelaskan secara jelas mengenai alasan dilibatkannya lembaga MCAI sebagai Penyediaan hibah terutama energi terbarukan berupa PLTS desa Teluk Sumbang, dengan mencari tau tujuan apa yang diinginkan pemerintah Indonesia dengan MCAI dibalik kerjasama hibah serta pemanfaatannya yang berdampak terhadap lingkungan desa Teluk Sumbang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data Primer dan data Sekunder yang penulis peroleh melalui *depth interview* yaitu wawancara pada pengurus kepentingan yang berkaitan dan perangkat desa serta studi literature, baik melalui buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah dan artikel lepas serta akses internet yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk menafsirkan, menggambarkan, dan menjelaskan persoalan atau fenomena berdasarkan data yang diperoleh ke dalam bentuk sederhana secara eksplanatif.

Hasil dan Pembahasan

Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-I) merupakan lembaga yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas pemerintah dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. MCA-I merupakan bagian dari inisiatif global *Millennium Challenge Corporation* (MCC) yang bertujuan untuk membantu negara berkembang mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memfokuskan pembangunan pada reformasi struktural yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat beberapa alasan tujuan dari pemerintah Indonesia melibatkan MCAI dalam penyediaan energi terbarukan di desa Teluk Sumbang.

1. Pengembangan Energi Baru Terbarukan Desa Teluk Sumbang bentuk Upaya pemerintah mendukung Implementasi Sustainable Development Goals Desa (SDGs-Desa) di Indonesia

Sustainable Development Goals adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. Indonesia turut andil dalam program SDGs pelaksanaan yang diterapkan di Indonesia semenjak ditetapkan pada bulan September 2015 di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di ikuti sekitar 159 negara. SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030 yang dilaksanakan oleh seluruh negara

Berisikan 18 *Goals* dan 169 target untuk periode pelaksanaan 2015 – 2030, diantaranya: 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; dan 18) Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. (Djpk. Kemenkeu.go.id, 2020)

Sustainable Development Goals Desa (SDGs-Desa) merupakan sekumpulan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Tujuan SDGs-Desa bertujuan untuk memastikan bahwa semua masyarakat desa di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik yang berkualitas, serta memperkuat kapasitas masyarakat desa untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara bijaksana.

Pengembangan energi baru terbarukan berbasis PLTS di desa Teluk Sumbang dapat dilihat sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung implementasi SDGs-Desa di Indonesia. dilihat pada table sebagai berikut:

Table 1 Jumlah Penerangan Listrik Rumah Tangga di Desa Teluk Sumbang

No	Jenis Penerangan Rumah Tangga	Jumlah
1	Listrik PLN	0
2	Listrik Non - PLN	122
3	Lampu minyak/lilin	1
4	Sumber penerangan lainnya	0

Sumber: dimuat oleh penulis berdasarkan sumber (sid.kemendesa.go.id/sdgs)

Berdasarkan jumlah penerangan listrik rumah tangga di desa Teluk Sumbang disebutkan bahwa pengguna energi listrik non – PLN / PLTS diperingkat jumlah tertinggi. Sedangkan pengguna penerangan terendah berkisar 1 rumah tangga untuk lampu minyak. Berdasarkan info yang didapat bahwa pengguna penerangan lampu minyak tersebut tinggal berjarak atau rumah tangga yang berjauhan dari pemukiman desa.

Sedangkan skor indeks bar SDGs desa Teluk Sumbang berada dinilai skor rata-rata 17,07 dari keseluruhan 18 *goals*, diantaranya

Table 2 perhitungan jumlah skor SDGs Desa Teluk Sumbang

No	Klasifikasi SDGs Desa	Skor	jumlah	Hasil
1	Desa Tanpa Kelaparan	50	307,27	51,21
2	Desa Sehat dan Sejahtera	59,82		
3	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99,46		
4	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	33,04		
5	Desa Tanpa Kesenjangan	14,95		
6	Desa Damai Berkeadilan	50		
7	Keseluruhan lainnya	18	307,27	17,07

Sumber : dimuat oleh penulis berdasarkan sumber (sid.kemendesa.go.id/sdgs)

Berdasarkan table diatas terdapat 6 klasifikasi SDGs Desa yang diterjadi di desa Teluk Sumbang, diantaranya:

1. Desa Tanpa Kelaparan (SDGs 2): bertujuan untuk menjamin bahwa semua orang di Indonesia terutama warga desa Teluk Sumbang memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang aman dan bergizi. Masyarakat desa Teluk Sumbang telah tercukupi dengan pemenuhan gizi sehari-hari yang bersumber dari hasil pangan darat dan laut. Seperti sayur mayur hasil kebun dan tangkapan ikan di laut.
2. Desa Sehat dan Sejahtera (SDGs 3): bertujuan untuk menjamin bahwa semua orang di desa Teluk Sumbang memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan layanan kesehatan primer yang terjangkau. upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa. Seperti adanya sarana layanan Kesehatan atau puskesmas di desa.
3. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan (SDGs 7): merupakan pokok utama adanya MCAI terlibat dalam penyediaan energi terbarukan bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat di desa tersebut memiliki akses yang cukup terhadap sumber energi yang bersih dan terbarukan. Keberadaan PLTS di desa Teluk Sumbang merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber energi yang bersih dan terbarukan, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya yang tidak bersih dan merusak lingkungan. keberhasilan dalam mencapai tujuan ini bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Menempati angka skor tertinggi dalam SDGs-Desa 99,46 %.
4. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata (SDGs 8): bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial secara inklusif berkelanjutan, dengan upaya untuk meningkatkan ekonomi di desa tersebut secara merata, sehingga semua masyarakat desa Teluk Sumbang dapat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi desa terbilang rendah di angka 33,04% yang menjadi terhambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan akses interkoneksi desa akses jalan darat, jarak tempuh, jaringan komunikasi, dan minimnya pertumbuhan penduduk yang bermukin di desa Teluk Sumbang.
5. Desa Tanpa Kesenjangan : bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat desa Teluk Sumbang dapat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang bermanfaat, tanpa terdapat kesenjangan yang merugikan salah satu kelompok masyarakat. Desa Teluk Sumbang mendapatkan skor rendah di angka 14,95 % . Kesenjangan di tengah masyarakat desa masih terasa diantaranya pertama, ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga terdapat kelompok masyarakat yang lebih miskin dan kurang mampu bersaing dengan kelompok masyarakat lainnya. Kedua, ketidakseimbangan akses terhadap layanan publik diantaranya layanan Kesehatan, Pendidikan, dan transportasi, sehingga terdapat kelompok masyarakat yang kurang memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ketiga, diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok masyarakat minoritas, ini kerap terjadi di tengah masyarakat desa Teluk Sumbang adanya pengelompokan pada perbedaan pandangan mengenai tata Kelola desa terhadap oknum-oknum desa yang memiliki kepentingan.

6. Desa Damai Berkeadilan (SDG 16): Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penduduk desa memiliki hak yang sama atas akses terhadap keadilan dan keamanan serta hidup dalam lingkungan yang damai.

Serangkaian 6 klasifikasi program SDGs Desa di Teluk Sumbang telah melalui aspek penilaian terhadap kualitas pembangunan desa tersebut. Terutama Energi terbarukan merupakan salah satu sarana yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk desa secara masif berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan dan merusak lingkungan. Dengan mengembangkan energi terbarukan di Desa Teluk Sumbang, pemerintah dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang bermanfaat dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara bijak sesuai dengan tujuan SDGs Desa.

2. Program Green Prosperity Dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Sebagai Langkah Promotor EBT PLTS di desa Teluk Sumbang

Energi Baru Terbarukan berbasis energi listrik PLTS di Desa Teluk Sumbang oleh MCAI melalui program *green prosperity* dapat memberikan implikasi besar terhadap segala aspek kegiatan sosial desa yang berkeadilan pada lingkungan, dengan menekan ketergantungan terhadap penggunaan energi diesel, tentunya nilai tersebut sejalan dalam *green economy* menekan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kebijakan Rencana Aksi Nasional – Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

RAN-GRK merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan inti RAN-GRK yang dimaksud ialah meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah; dan kegiatan pendukung lain. Sedangkan kegiatan pendukung ialah adanya interaksi sosial yang diciptakan bersama melalui pengetahuan SDM dan pembangunan berkelanjutan. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK SDGs di Indonesia.

Indonesia dalam Pendanaan perubahan iklim RAN-GRK merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam SDGs telah menyiapkan anggaran untuk aktivitas terkait dengan perubahan iklim baik aksi adaptasi, mitigasi ataupun kegiatan pendukung.

Pagu indikatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 untuk ketiga aktivitas tersebut sebelum adanya Peraturan Presiden No 61 tahun 2011 adalah sebesar Rp. 110.270,37 milyar, Dengan keluarnya Peraturan Presiden tersebut, sebanyak 16 kementerian telah menyelaraskan alokasi anggaran untuk perubahan iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 – 2014 sebesar Rp 165.932,02 milyar yang artinya melebihi alokasi anggaran dalam RPJMN tahun 2010 – 2014.

Selain menggunakan dana APBN melalui K/L dan APBD, terdapat pendanaan perubahan iklim juga dilakukan melalui sumber lain seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), *Millenium Challenge Account Indonesia* (MCAI), dan Fund for REDD+ Indonesia (FREDDI). Semua Lembaga tersebut memberikan pendanaan untuk mitigasi, Secara lengkap pendanaan untuk perubahan iklim tersebut serta ruang lingkup baik untuk adaptasi dan mitigasi.

Tabel 4.2 Pagu Indikasi Sebelum Dan Sesudah Perpres 61/2011 (milyar)

No	Aktifitas	RPJMN 2010 – 2014 (sebelum)	RPJMN 2010 – 2014 (sesudah)
1	Adaptasi	68.371,42	63.850,86
2	Mitigasi	37.899,01	96.681,54
3	Pendukung	4.049,90	5.399,70
		110.270,37	165.932,02

Sumber : (jdih.bappenas.go.id, 2011)

Sebagian besar dana hibah MCAI dialokasikan pada pendanaan perubahan iklim ruang lingkup mitigasi. Dalam konteks perubahan iklim, mitigasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Mitigasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan sumber energi fosil, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Mitigasi juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi pertumbuhan populasi, meningkatkan konservasi lahan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim.

Mekanisme pendanaan anggaran MCAI diberikan langsung pada masyarakat dalam pengawasan yang terlampir dan diterima langsung oleh pihak MCAI melalui kertas konsep PSDABM dari desa-desa yang terpilih salah satunya desa Teluk Sumbang. Ruang lingkup implementasi hibah MCAI diantaranya pada penggunaan rencana tata guna lahan, bantuan teknis dan pengawasan, fasilitas keuangan, dan pengetahuan hijau. Pengetahuan hijau yang meliputi kemakmuran hijau / *green prosperity*, SDM, pemanfaatan energi baru terbarukan seperti pengadaan PLTS, dan pemberdayaan alam sebagai objek nilai tambah ekonomis dalam mengentas kemiskinan. Teluk Sumbang termasuk dalam kriteria Kawasan desa terpadu yang memenuhi ketentuan – ketentuan standar MCAI.

3. Pengentasan Kemiskinan Dan Ketergantungan Energi Litrik Desa Teluk Sumbang Melalui Program *Green Prosperity*

Program *Green Prosperity* / GP sendiri memiliki nilai pokok akan *green economy* sebagai kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. GP merupakan salah satu dari 3 agenda besar yang direncanakan pembangunannya dalam kerjasama tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak oleh pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan MCC.

Perjanjian pelaksanaan program, para pihak akan mengadakan perjanjian dengan memberikan perincian lebih lanjut tentang pengaturan pelaksanaan, pertanggungjawaban fiscal, dan pencairan serta penggunaan dana MCC. Yaitu perjanjian itu disebut dengan “*the Program Implementation Agreement*” atau disingkat PIA ([the program implementation agreement, 2011](#)).

Tujuan dari *Compact* adalah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi. Terdapat rangkaian dari di tiap masing – masing point “*Project Objectives*” secara kolektif. *The Green Prosperity Objective* (GP) yaitu Meningkatkan

produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas energi terbarukan dan meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan meningkatkan praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan dari program *green prosperity* yang disebutkan diatas, terdapat nilai – nilai relevan dengan konsep *green economy* yang menekankan pentingnya mendorong produktivitas masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menekan ketergantungan manusia terhadap energi fosil, dan memberikan energi pilihan terbaik yang lebih ramah lingkungan yaitu energi terbarukan.

Peran pemerintahan Indonesia dalam kemakmuran hijau atau GP diatur dalam Permenkeu RI Nomor 124/PMK. 05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah *Millennium Challenge Corporation* dan berdasarkan Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang disebutkan bahwa kementerian keuangan mempunyai wewenang dalam mengatur pengelolaan hibah yang bersumber dari MCC. Adapun kebijakan pemerintah Indonesia yang diatur dalam Bab IV Mekanisme pengalokasian Pagu dalam RKA-K/L dan DIPA Pasal 6 ayat 2 disebutkan semua kegiatan yang didanai oleh hibah MCC tidak akan dikenakan fasilitas pajak dan kebapeanan.

Teruntuk di tingkat masyarakat proyek GP memberikan peluang pada mitra kerja yang tergabung dalam menyukseskan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, para relawan, swasta, masyarakat sipil dan untuk menyokong kesuksesan pembangunan yang dapat memberikan dampak besar untuk pembangunan berkelanjutan jangka Panjang termasuk yang terjadi di desa Teluk Sumbang pada pembangunan PLTS sebagai energi alternatif terbarukan yang memberikan dampak positif pada lingkungan hidup dan alam sekitarnya.

4. Program Off Grid Power Plant Pada 3 Desa Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

“Off Grid Power Plant pada 3 Desa di Kabupaten Berau Kalimantan Timur” merupakan agenda peresmian dimulainya proyek hibah yang di implementasikan kabupaten Berau tahun 2017. tahap pelaksanaan proyek lanjutnya khusus energi terbarukan PLTS dan hidro *hybrid* oleh MCAI, terdapat 3 desa yang terpilih akan ketergantungan energi listrik setelah sebelumnya melalui tahap usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau *Musrenbangdes*, lalu tembus di tingkat *musrenbang* Kabupaten yang mana pengajuan desa Teluk Sumbang tersebut dikawal oleh LSM Menapak Indonesia.

Setelah melalui tahapan usulan dalam musyawarah, tiap perwakilan 3 desa tersebut diminta untuk membuat proposal dalam kertas konsep PSDABM yang akan diterima langsung oleh pihak MCAI. Diantaranya tiga desa tersebut ialah Long Beliu, Merabu Mapulu, dan desa Teluk Sumbang Terpilih berdasarkan kebutuhan dan kreativitas pembangunan milik desa.

Desa Teluk Sumbang terpilih berdasarkan rangking dalam kategori pembangunan desa kreatif yang sebelumnya dengan mengandalkan pemanfaatan aliran mata air gunung menjadi sumber energi listrik *Hydro* turbin yang diciptakan oleh warga desa sendiri, namun pemanfaatannya relatif sangat kecil dan terbatas hanya beberapa rumah yang dapat menikmati dari system jaringan listrik mikrohidro/PLTMH.

Pengaruh energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS sangat cukup memberi dampak besar pada segala aspek kebutuhan energi listrik warga desa Teluk Sumbang secara menyeluruh, diantaranya:

- a. Masyarakat menikmati penggunaan listrik dengan biaya tarif yang relatif lebih terjangkau murah/ekonomis yang berbanding penggunaan energi diesel terbatas dan berisik di tengah pemukiman.
- b. Transisi ketergantungan energi fosil dengan mengoptimalkan efisiensi energi PLTS ramah lingkungan.
- c. Kegiatan pelayanan umum dan ekonomi seperti kantor Desa, Pendidikan, Kesehatan, dan memaksimalkan kegiatan BUMDes seperti pengelolaan objek wisata berkelanjutan.
- d. Tiap warga desa dapat mengolah es batu dirumah masing-masing sebagai penunjang ekonomi agar stok penyediaan es batu bagi nelayan dapat terpenuhi
- e. Adanya penerangan lampu jalan dimalam hari yang sangat membantu warga desa dalam berpergian dalam mengontrol hewan ternak dari tindakan pencurian daging ternak.
- f. Kapasitas energi listrik PLTS lebih besar dari pada kapasitas konsumsi listrik desa. Sehingga PLTS memiliki banyaknya cadangan energi yang dapat mampu menerangi 200+ rumah tangga.
- g. Dan meningkatnya kesadaran sosial dan pengetahuan SDM masyarakat desa dengan edukasi pentingnya pemberdayaan ekosistem dan lingkungan hijau berkelanjutan.

Konsumsi Masyarakat Teluk Sumbang akan energi PLTS berdasarkan tegangan daya per-rumah tangga yang bervariasi sekitar 600W – 1,4 Kw (Watt). Penggunaan daya kurang dari 1000W dimanfaatkan untuk memenuhi kegiatan rumah tangga sehari-hari oleh masyarakat desa. Sedangkan penggunaan daya listrik lebih dari 1000W digunakan untuk pelaku usaha es batu dan resort penginapan wisata memerlukan daya besar pada penerangan dan penggunaan daya AC.

Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan, alasan terlibatnya MCAI dalam mendorong penyediaan energi terbarukan di desa Teluk Sumbang oleh pemerintah Indonesia.

Pertama, MCAI hadir sebagai Lembaga pelaksana hibah yang mengawasi, mengatur, mengelola pelaksanaan program di Indonesia. seperti penyediaan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas energi listrik PLTS desa Teluk Sumbang.

Kedua, diperlukannya hibah MCAI sebagai bentuk bantuan investasi hijau pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksud ialah program pembangunan yang tidak dapat ditangani oleh negara terhadap pembangunan daerah-daerah terpencil dan tertinggal, dengan harus melibatkan pihak lain untuk mensukseskan pembangunan nasional.

Ketiga, melalui program MCC untuk mengentas kemiskinan global. MCAI hadir sebagai aktor pendukung menyukseskan program global *Sustainable Development Goals* di Indonesia, khususnya kabupaten Berau di desa Teluk Sumbang termasuk salah satu desa literasi yang diawasi oleh Kemendesa dalam program nasional SDGs Indonesia. Melalui investasi hibah berupa energi listrik PLTS agar memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan, mengentas kemiskinan dan menjalankan nilai-nilai hijau yang berkeadilan terhadap lingkungan desa.

Hal tersebut menjadi landasan mendasar alasan Indonesia membutuhkan kemitraan MCC, terlepas dari hal-hal yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah Indonesia pada kekuatan modal pembangunan sarana infrastruktur energi listrik dikawasan terpencil khususnya desa Teluk Sumbang. MCAI berperan melalui skema

program *green prosperity* pada penyediaan anggaran pembangunan energi terbarukan berbasis PLTS di desa Teluk Sumbang. Dengan mengandalkan penyediaan hibah *compact* tentu ini menjadi keuntungan bagi Indonesia, namun dibalik keuntungan tersebut, terdapat penilaian suatu “kedudukan negara” oleh negara maju seperti Amerika Serikat terhadap negara *lower middle income country* (LMIC). Yang lambat pengelolaan negara akan pertumbuhan finansial dan infrastruktur, termasuk Indonesia yang bersedia disejajarkan dengan negara-negara berkembang penerima lainnya.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Dokumen

Badan Pusat Statistik Indonesia. *Electricity Establishment Survey. 2011 – 2015*

Buku Draft Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur – Bappeda.Kaltim

Makmun, , Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peranan Kementerian Keuangan, Artikel dalam Jurnal “Ekonomi dan Pembangunan”, LIPI, volume XIX (2) 2011

Millennium Challenge Account – Indonesia Monitoring and Evaluation Plan, July 2017 Version 4

Pasal 23 ayat 1 Undang-undang dasar 1945, berisikan bahwa “anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Stephen R. Goss dalam buku "*Greening the Economy: The Benefits and Challenges of Transitioning to a Low Carbon and Resource Efficient Economy*" 2012

Surat Kesepahaman the Program Implementation Agreement, dalam Millennium Challenge Compact Between The United State of America Acting Through The Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia. Bali, Indonesia. 19 November 2011

Internet

AntaraNews. listrik di sebagian Kutim belum 24 jam
<https://kaltim.antaranews.com/berita/11183/listrik-di-sebagian-kutim-belum-24-jam>

Berau Prokal. Perjuangkan penambahan jaringan listrik di Wilayah Pesisir. Dalam
<https://berau.prokal.co/read/news/54429-perjuangkan-penambahan-jaringan-listrik-di-wilayah-pesisir/6>.

Beraukab. Geografis kabupaten Berau, https://beraukab.go.id/v2/?page_id=5640

Berita Kaltim. Kerap Listrik Padam Mahasiswa Demo PT PLN area Berau
<https://beritakaltim.co/kerap-mati-lampu-mahasiswa-demo-pt-pln-area-berau/>

Berita Kaltim. Kerap Mati Lampu Mahasiswa Demo PT PLN area berau.
<https://beritakaltim.co/kerap-mati-lampu-mahasiswa-demo-pt-pln-area-berau>.

BMKG Samarinda. Perkiraan Cuaca Kalimantan Timur
<http://www.bmkgamarinda.com/prakiraan-cuaca>

EBTKE ESDM. Peresmian PLTS di tiga kampung Berau” dalam
<https://ebtke.esdm.go.id/post/2018/04/27/1946/tiga.pembangkit.listrik.tenaga.hybrid.di.berau.siap.beroperasi>.

Fdokumen.com Kertas Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM)”,
<https://fdokumen.com/document/dokumen-1-kertas-konsep-hibah-psdabm.html>

Kertas Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM)”,
<https://fdokumen.com/document/dokumen-1-kertas-konsep-hibah-psdabm.html>

Kemenkeu. Sosialisasi permendesa 13 2020 dalam terbitan <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Kemendesa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi,
<https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>

Kompas. 3 hambatan umum pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia
<https://money.kompas.com/read/2016/12/28/054500426/pertamina.ini.3.hambatan.pengembangan.energi.baru.dan.terbarukan.?page=all>.

Kompas.com Indonesia resmi resesi
<https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/Indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>

MCC Gov. Seleksi indikator dalam <https://www.mcc.gov/who-we-select/indicators>

ResearchGate. A three pillar depiction of green economy”
https://www.researchgate.net/figure/2-A-three-pillars-depiction-of-the-green-economy_fig1_324278639